

DETERMINASI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI INDONESIA 2016-2020

Tasya Putri Indra Pranizty¹⁾, Yustirania Septiani²⁾

¹ Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang
email: tasyaputriip2306@gmail.com

² Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang
email: yustirania_septiani@untidar.ac.id

Abstract

The problem of poverty is a problem that is quite complex and every country has faced poverty, including Indonesia. The poverty level can be influenced by the TPT, dependency ratio, and education. The purpose of this research is to analyze how partially and simultaneously the influence of TPT, dependency ratio, and education (APS, APM, and APK in high school level) on provincial poverty levels in Indonesia 2016-2020. The data used is secondary data, in the form of time series (2016-2020) and cross section (34 provinces in Indonesia). The analytical tool used is panel regression analysis assisted by using Eviews 10. The results of this study indicate that the TPT has a positive and significant effect on the poverty level. The dependency ratio has a negative but insignificant effect on the poverty level. The education variable with the APS for high school education level has a positive and significant effect on the poverty level. The education variable with the proxy APM for high school education level has a positive and significant effect on the poverty level. And the education variable with the APK proxy for high school education level has a negative but insignificant effect on the poverty level. Simultaneously, open unemployment rate (TPT), dependency ratio, and education (APS, APM, and APK for high school education level) together influence the provincial poverty level in Indonesia in 2011-2020.

Keywords: *Education, Dependency Ratio, Open Unemployment Ratio, Poverty Level.*

1. PENDAHULUAN

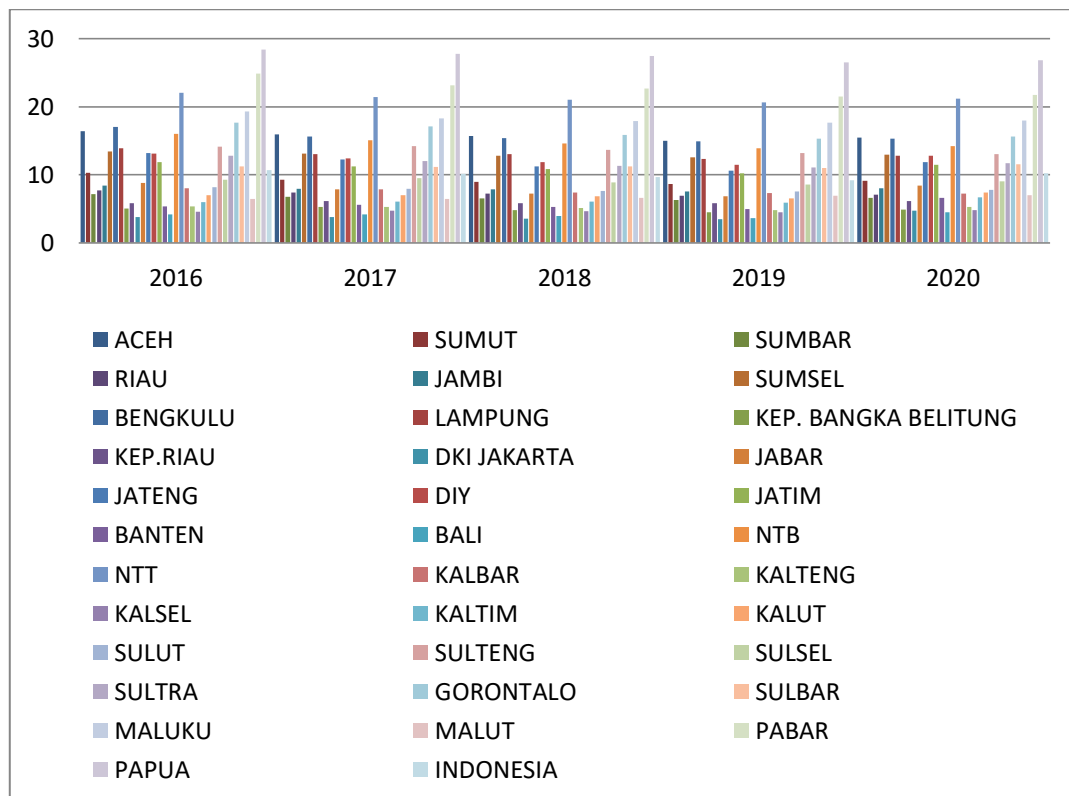
Permasalahan kemiskinan merupakan suatu masalah yang cukup kompleks dan hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah kemiskinan, tidak terkecuali Indonesia. Setiap negara mencoba melakukan yang terbaik untuk meminimalisir kemiskinan di negaranya. Permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan salah satunya dengan cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang tersedia dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Jika tidak, maka suatu negara dapat dikatakan kesulitan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada di negara tersebut. Meskipun pemerintah telah membuat, mengatur dan menerapkan berbagai kebijakan, kemiskinan di Indonesia juga belum dapat teratasi dengan baik. Kemiskinan secara umum dapat dikatakan sebagai keadaan seseorang dimana tidak berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya, baik itu merupakan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lain yang diperlukan (Widowati et al., 2018).

Tingkat kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi, karena pada tahun 2020 sekitar 10.19 persen dari total penduduk Indonesia masih dikatakan miskin. Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh perkotaan, di mana peningkatan penduduk miskin di perkotaan sebesar 1.32 persen, sedangkan penduduk miskin di perdesaan hanya meningkat sebesar 0.60 persen. Selain itu, garis kemiskinan di Indonesia juga mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh meningkatnya harga pangan (Timorria, 2021). Kemiskinan memiliki sifat yang kompleks, karena bukan hanya

berkaitan dengan ekonomi namun juga sudah berkembang menjadi berkaitan dengan politik, sosial, kesejahteraan dan pendidikan (Asrol & Ahmad, 2018).

Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia sangat melimpah dan berpotensi sehingga apabila dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebihan, maka wilayah Indonesia akan berkembang dengan cepat. Tetapi, apabila melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016-2020 tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia walaupun cenderung menurun namun masih dikategorikan rata-ratanya masih di atas 10%. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir angka kemiskinan. Berikut ini merupakan data tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia dari tahun 2016-2020.

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020 (satuan %)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan data di atas, diketahui tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Terutama di Provinsi Papua yang tingkat kemiskinannya melebihi 25 persen, karena tahun 2016 sebesar 28.40% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 26.80% sehingga dapat dikatakan bahwa Provinsi Papua menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari provinsi lainnya. Sedangkan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta karena dari tahun 2016-2020 tingkat kemiskinan yang dihasilkan kurang dari 5%. Pada tahun 2019, semua provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Dimana tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9.22%. Namun pada tahun 2020, semua provinsi di Indonesia mengalami kenaikan sehingga tingkat kemiskinan Indonesia pun meningkat menjadi 10.19%. Meskipun kenaikannya tidak melebihi tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2016 yang sebesar 10.70%. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2020 merupakan masa pandemi Covid-19, yang menyebabkan seluruh sektor terdampak. Ditandai dengan banyaknya pekerja yang di PHK, kegiatan produksi menurun, dan rendahnya

penghasilan. Penghasilan yang rendah menyebabkan sulitnya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga semakin banyak orang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka kemiskinan pun juga akan meningkat.

Kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kemiskinan. Apabila sumber daya manusia berkualitas, maka terjadi peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas, maka menyebabkan konsumsi masyarakat meningkat sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan berkurang (Nainggolan et al., 2020).

Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya tingkat pengangguran terbuka. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang sering timbul bersamaan, karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya manusia di suatu wilayah (Puspita, 2015). Kemiskinan terjadi karena lapangan kerja dan modal yang terbatas sehingga pengangguran semakin meningkat. Semakin meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka berpotensi pada meningkatnya tingkat kemiskinan suatu wilayah (Dewi et al., 2020).

Tingkat pengangguran terbuka provinsi yang ada di Indonesia memiliki nilai yang berfluktuatif, namun cenderung menurun dari tahun 2016-2020. Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka terbesar yaitu Provinsi Banten yaitu pada tahun 2016 sebesar 8.92% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 10.64%. Sedangkan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah yaitu Provinsi Bali, tahun 2016 sebesar 1.89% dan terjadi peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2020 menjadi 5.63%.

Selanjutnya, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh rasio ketergantungan atau *dependency ratio*. Ketergantungan merupakan suatu kondisi dimana kelompok masyarakat atau populasi tertentu bergantung pada populasi masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Mishra, 2011). *Dependency ratio* disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu wilayah. Semakin meningkatnya *dependency ratio*, maka tingkat kemiskinan pun juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya pengeluaran atau beban penduduk yang berusia produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 berfluktuatif dan cenderung terus menurun setiap tahunnya. NTT merupakan provinsi yang rasio ketergantungannya paling tinggi diantara provinsi lain, yaitu pada tahun 2016 mencapai 65.99%. Namun angka tersebut terus menurun sampai pada tahun 2020 menjadi sebesar 63.5%. Provinsi yang paling rendah rasio ketergantungannya yaitu Provinsi DKI Jakarta dimana rasio ketergantungannya dibawah 42%. Pada tahun 2016, rasio ketergantungan Provinsi DKI Jakarta sebesar 40.32% dan justru terus meningkat sampai tahun 2020 sebesar 41.9%.

Selain itu, tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kemiskinan. Semakin rendahnya pendidikan yang ditempuh, maka tingkat kemiskinan akan meningkat. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang rendah, maka cenderung kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki orang tersebut juga rendah. Hal ini membuat orang yang berpendidikan rendah sulit untuk terserap ke dalam dunia kerja, sehingga orang tersebut tidak mendapatkan penghasilan. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah kualitasnya semakin menurun dan produktivitas masyarakat juga rendah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan (Pratama, 2014). Fasilitas pendidikan yang menunjang juga dapat membantu keberhasilan pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah. Hal itu akan menyebabkan tingkat pendidikan meningkat dan produktivitas penduduk juga akan semakin meningkat (Giovanni, 2018).

Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SMA provinsi Indonesia tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berarti pemerintah cukup berhasil untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka partisipasi sekolah jenjang SMA yang tinggi. Pada tahun 2016, APS jenjang SMA sebesar 87.2% dan terus terjadi peningkatan

sampai tahun 2020 menjadi 88.95%. Sedangkan provinsi terendah yaitu Provinsi Papua karena masih di bawah 65%. Meskipun begitu, APS jenjang SMA terus meningkat. Tahun 2016 sebesar 62.07% dan tahun 2020 sebesar 64.83%.

Angka partisipasi murni (APM) jenjang SMA provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 setiap tahunnya cenderung meningkat. Meskipun masih di bawah 75%, namun peningkatannya cukup signifikan. Provinsi yang peningkatan APM jenjang SMA yang paling tinggi yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau, dimana saat tahun 2016 kedua provinsi tersebut lebih dari 71%, Provinsi Bali sebesar 71.71% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 73.29%. Begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2016 sebesar 71.58 dan tahun 2020 sebesar 73.45%. Sedangkan provinsi dengan APM jenjang SMA terendah yaitu Provinsi Papua yang masih di bawah 45%. Pada tahun 2016, APM jenjang SMA Provinsi Papua sebesar 43.27% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 44.73%.

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMA provinsi di Pulau Indonesia tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang peningkatan APK jenjang SMA nya cukup pesat. Bahkan pada tahun 2020, mencapai angka 98.31% dari tahun 2016 yang hanya sebesar 89.85%. Sedangkan provinsi yang terendah yaitu Provinsi Papua, karena meskipun peningkatan APK jenjang SMA cenderung pesat dibandingkan dengan provinsi lain namun masih di bawah 80%. Pada tahun 2016, APK jenjang SMA Provinsi Papua 66.85% dan terus terjadi peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 76.55%.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), *dependency ratio*, pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA) terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia. Peneliti ingin membuktikan apakah variabel-variabel yang telah dipilih yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), *dependency ratio*, dan pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA) terhadap tingkat kemiskinan 34 provinsi Indonesia. Sehingga tujuan diadakannya penelitian yaitu menganalisis bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan dari TPT, *dependency ratio*, dan pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA) terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan berarti kebutuhan dasar yang harusnya dapat terpenuhi namun terkendala karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, seperti tidak mampu untuk melakukan kegiatan yang produktif, sulit mengakses sumber daya sosial dan ekonomi, memperoleh perlakuan diskriminatif, dan sulit untuk keluar dari budaya miskin (Arsyad, 2010). Tingkat pendidikan yang rendah dapat disebabkan karena sumber daya yang dimiliki kualitasnya rendah sehingga dapat menyebabkan kemiskinan (Nurdiana et al., 2020).

Menurut Kuncoro (2010), kemiskinan disebabkan oleh tiga hal apabila dilihat sisi ekonominya, yaitu:

1. Kemiskinan terjadi karena sumber daya yang dimiliki tidak sama sehingga pendapatan yang terdistribusi terjadi ketimpangan.
2. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh sumber daya manusia dilihat dari kualitasnya. Rendahnya keunggulan sumber daya manusia, menyebabkan penurunan produktivitas sehingga akan menyebabkan tingkat pendidikan akan rendah, terdapat diskriminasi, dan nasib kurang beruntung.
3. Kemiskinan terjadi karena akses terhadap modal berbeda-beda.

Apabila seseorang menganggur, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan dan hal itu membuat tingkat kemiskinan akan semakin bertambah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Arsyad (2012) dalam Marinda et al. (2017), pengangguran memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Pengangguran terbuka, merupakan suatu kondisi dimana pekerja memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja, namun tidak didukung dengan adanya pekerjaan yang sesuai.
2. Kurang kerja, merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah bekerja, namun produktivitasnya masih kurang. Sehingga produksi pun menjadi rendah.
3. Cacat, merupakan suatu kondisi dimana seseorang bekerja namun karena memiliki suatu penyakit sehingga menyebabkan jam kerja atau produktivitasnya menurun.

Pengangguran dilihat berdasarkan jam kerjanya dapat dikategorikan sebagai pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, setengah menganggur, dan pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil dari perbandingan total pengangguran dengan total angkatan kerja di suatu wilayah yang dinyatakan dalam bentuk % (persen).

Hukum Okun menyatakan bahwa tingkat pengangguran dan *output* memiliki hubungan yang erat dalam jangka pendek. Okun percaya bahwa pertumbuhan *output riil* dengan perubahan pengangguran memiliki hubungan yang erat (Yustie, 2017).

Dependency ratio atau rasio ketergantungan menurut Kozak et al. (2012) merupakan indikator kependudukan yang dapat memperlihatkan kondisi ekonomi di suatu negara secara kasar. *Dependency ratio* terjadi karena pertumbuhan penduduk yang bukan produktif yaitu umur 0-14 tahun meningkat, sehingga pada akhirnya rasio ketergantungan akan meningkat (Ginting et al., 2020). Kelompok penduduk yang tidak aktif secara ekonomi yaitu berumur 0-14 tahun dan berumur 60 tahun ke atas. Kelompok ini bergantung kepada kelompok penduduk dengan usia produktif yaitu 15-59 tahun karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Das, 2018). Tingginya rasio ketergantungan disebabkan oleh suatu kondisi dimana penduduk dengan usia yang tidak produktif lebih besar apabila dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Karena pendapatan yang didapatkan penduduk yang berusia produktif digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup yang diperlukan oleh penduduk dengan usia yang tidak produktif (Sukma et al., 2019). Apabila rasio ketergantungan angkanya terus meningkat dan tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang memadai agar yang berusia produktif dapat terus bekerja, maka hal ini akan menyebabkan tingkat kemiskinan akan semakin mengalami penambahan.

Pendidikan merupakan ajaran yang disampaikan kepada anak secara sengaja agar menjadi dewasa. Ajaran tersebut berasal dari orang tua (Purwanto, 2010). Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan yaitu upaya mewujudkan suasana atau kondisi dan proses pembelajaran secara sadar dan teratur. Hal tersebut dilakukan agar melakukan pengembangan potensi yang dimiliki siswa secara aktif sehingga berguna bagi dirinya dan negara dengan kekuatan keagamaan, memiliki akhlak yang baik, dapat mengendalikan diri, cerdas, serta terampil.

Angka partisipasi sekolah (APS) menggambarkan tentang ukuran daya tampung atau kapasitas dari sistem pendidikan yang ada kepada penduduk berusia sekolah. APS menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengamati penduduk berusia sekolah dan struktur kegiatan yang dilakukan oleh penduduk yang berhubungan dengan sekolah. APS merupakan penduduk yang masih bersekolah pada tingkatan usia di suatu jenjang pendidikan terhadap kelompok penduduk di usia tersebut (BPS, 2020). Jadi, APS yaitu jumlah penduduk yang sekolah pada usia tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tersebut.

Angka partisipasi murni (APM) dapat digunakan untuk mengukur usia penduduk, dimana penduduk tersebut termasuk ke dalam partisipan pendidikan pada jenjang tertentu dengan tepat. APM lebih rendah dari APK, karena APM hanya melihat penduduk yang memang hanya memiliki usia yang pas pada saat jenjang pendidikan tertentu. Apabila APM mencapai angka 100, maka penduduk yang

berusia pendidikan jenjang tertentu sudah dapat menikmati pendidikan tepat waktu (BPS, 2020).

Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk mengukur penduduk pada tingkat pendidikan tertentu dan tidak melihat usianya. APK juga dapat berguna untuk melihat apakah program pembangunan dalam bidang pendidikan berhasil atau tidak, dengan melihat seberapa banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan. Apabila APK mendekati atau bahkan melebihi 100, maka hal itu menunjukkan bahwa penduduk di suatu wilayah yang usianya tidak sesuai dengan usia yang seharusnya pada suatu jenjang pendidikan tertentu lebih banyak dari penduduk yang usianya tepat dan sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut (BPS, 2020).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ginting et al. (2020) menunjukkan bahwa: 1) pendidikan pengaruhnya positif sedangkan rasio ketergantungan pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) pendidikan dan pertumbuhan ekonomi pengaruhnya negatif, sedangkan rasio ketergantungan pengaruhnya positif dan signifikan terhadap kemiskinan, 3) pendidikan pengaruhnya secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan tidak ada pengaruh tidak langsung dari rasio ketergantungan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Provinsi Papua.

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Rohana et al. (2017) menunjukkan bahwa secara parsial, *dependency ratio* pengaruhnya positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan penduduk pengaruhnya negatif terhadap kemiskinan. Secara simultan, *dependency ratio* dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana et al. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak punya pengaruh terhadap kemiskinan. Inflasi juga tidak punya pengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran terbuka pengaruhnya signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan bersifat kuantitatif. Digunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari instansi atau lembaga terkait dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dibutuhkan yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), *dependency ratio*, dan pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA) 34 provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memahami literatur-literatur terdahulu seperti jurnal yang sesuai dengan tema penelitian ini. Sedangkan dokumentasi yaitu peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian yang telah didokumentasikan oleh instansi terkait yang diperlukan oleh peneliti.

Variabel terikat (*dependen*) yang digunakan yaitu tingkat kemiskinan dengan satuan % (persen). Sedangkan variabel independennya yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), *dependency ratio*, dan pendidikan dengan proksi angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA dengan satuan % (persen) pada provinsi di Indonesia tahun 2016-2020.

Menggunakan alat analisis regresi panel. Data panel perpaduan data *cross section* (i) dengan data *time series* (t). *Cross section* (i) yaitu pengambilan data di daerah terpilih dalam waktu yang sama, penelitian ini menggunakan 34 provinsi di Indonesia. Data *time series* (t) yaitu data dengan waktu beruntun sehingga tahun yang digunakan harus berurutan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan tahun 2016-2020 selama 5 tahun.

Teknik estimasi model menggunakan FEM, CEM, dan REM. Cara menentukan suatu model agar cocok untuk digunakan, dapat melakukan uji sebagai berikut: (1) Uji Chow guna dibandingkannya model terbaik untuk dipilih, CEM atau

FEM, (2) Uji Hausman guna dibandingkannya model terbaik untuk dipilih, REM atau FEM, (3) Uji Lagrange Multiplier guna dibandingkannya model terbaik untuk dipilih, CEM atau REM (Widarjono, 2018). Penelitian ini menggunakan regresi panel, sehingga tidak perlu menggunakan uji asumsi klasik karena data panel mempunyai keunggulan. Keunggulannya yaitu memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mengukur suatu dampak yang dihasilkan serta sudah membahas perilaku yang lebih kompleks dalam suatu model. *Cross section* (i) atau *time series* (t) tidak dapat melakukan hal tersebut (Gujarati, 2012).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentuan Model

Membandingkan model terbaik yang dapat dipakai antara CEM dan FEM dalam penelitian, dapat menggunakan uji chow untuk mengujinya. Ketentuannya adalah:

H_0 : CEM

H_1 : FEM

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	528.597997	(33,131)	0.0000
Cross-section Chi-square	832.833443	33	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Hasil yang didapatkan dari uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan 0.0000. Sehingga hasil tersebut menandakan signifikan pada α 5%; 0.05 karena probabilitasnya lebih kecil. Artinya, H_0 tidak diterima dan H_1 diterima. Keputusan berdasarkan hasil tersebut dipilih FEM sebagai model yang dapat digunakan. Selanjutnya dilakukan uji hausman.

Mencocokkan model terbaik yang dapat dipakai antara REM dan FEM dalam penelitian, dapat digunakan uji hausman untuk mengujinya. Ketentuannya adalah:

H_0 : REM

H_1 : FEM

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.276363	5	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Hasil yang didapatkan dari uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan 0.0000. Sehingga hasil tersebut menandakan signifikan pada α 5%; 0.05 karena probabilitasnya lebih kecil. Artinya, H_0 tidak diterima dan H_1 diterima. Keputusan berdasarkan hasil tersebut dipilih FEM sebagai model yang dapat digunakan. Karena dari dua uji diatas hasilnya FEM, maka tidak perlu melakukan uji lagrange multiplier.

Hasil Regresi Panel

Tabel. 3 Hasil Regresi Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.50896	10.24299	3.369032	0.0010
TPT	0.285318	0.048104	5.931240	0.0000
DR	0.127484	0.096549	1.320409	0.1890
APS_SMA	-0.674040	0.105460	-6.391443	0.0000
APM_SMA	0.321107	0.133711	2.401503	0.0177
APK_SMA	-0.014793	0.013497	-1.096064	0.2751

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.995681	Mean dependent var	10.79188
Adjusted R-squared	0.994428	S.D. dependent var	5.660220
S.E. of regression	0.422494	Akaike info criterion	1.312941
Sum squared resid	23.38369	Schwarz criterion	2.032330
Log likelihood	-72.59996	Hannan-Quinn criter.	1.604860
F-statistic	794.7828	Durbin-Watson stat	1.289011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Koefisien Determinasi (R^2)

R-Squared memiliki nilai 0.995681. Berarti sebesar 99.56% variabel Y (Tingkat Kemiskinan) dipengaruhi oleh variabel X (TPT, *Dependency Ratio*, dan Pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA)). Sisanya sebesar 0.44% variabel Y (Tingkat Kemiskinan) dipengaruhi variabel lainnya selain model yang digunakan.

Hasil Uji t

$Df = n - k = 170 - 6 = 164$ (1)

Berdasarkan t-tabel, nilai kritis yang diperoleh dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu 1.65420. Hasil dari analisis uji t di atas, penjelasannya sebagai berikut:

a. Pengaruh TPT Terhadap Tingkat Kemiskinan:

Hasil uji statistik menunjukkan t-hitung $>$ t-tabel yaitu 5.931240 lebih besar daripada 1.65420 pada $\alpha 5\%$; 0.05. Apabila melihat nilai probabilitasnya, maka 0.0000 lebih kecil dari $\alpha 5\%$; 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya adalah pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan itu positif dan signifikan.

b. Pengaruh DR Terhadap Tingkat Kemiskinan:

Hasil uji statistik menunjukkan t-hitung $<$ t-tabel dimana 1.320409 lebih kecil daripada 1.65420 pada $\alpha 5\%$; 0.05. Apabila melihat nilai probabilitasnya, maka 0.1890 lebih besar dari $\alpha 5\%$; 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya adalah pengaruh *dependency ratio* terhadap tingkat kemiskinan itu negatif dan tidak signifikan.

c. Pengaruh APS Terhadap Tingkat Kemiskinan:

Hasil uji statistik menunjukkan t-hitung $>$ t-tabel dimana -6.391443 lebih besar daripada 1.65420 pada $\alpha 5\%$; 0.05. Apabila melihat nilai probabilitasnya, maka 0.0000 lebih kecil dari $\alpha 5\%$; 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya adalah pengaruh APS tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan itu positif dan signifikan.

d. Pengaruh APM Terhadap Tingkat Kemiskinan:

Hasil uji statistik menunjukkan t-hitung $>$ t-tabel dimana 2.401503 lebih besar daripada 1.65420 pada taraf signifikansi $\alpha 5\%$; 0.05. Apabila melihat nilai probabilitasnya, maka 0.0177 lebih kecil dari $\alpha 5\%$; 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya adalah pengaruh APM tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan itu positif dan signifikan.

e. Pengaruh APK Terhadap Tingkat Kemiskinan:

Hasil uji statistik menunjukkan t-hitung $<$ t-tabel dimana -1.096064 lebih kecil daripada 1.65420 pada taraf signifikansi $\alpha 5\%$; 0.05. Apabila melihat nilai probabilitasnya, maka 0.2751 lebih besar dari $\alpha 5\%$; 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya adalah pengaruh APK tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan itu negatif dan tidak signifikan.

Hasil Uji F

$$Df_1: k - 1 = 6 - 1 = 5 \dots\dots\dots(2)$$

$$Df_2: n - k = 170 - 6 = 164 \dots\dots\dots(3)$$

Berdasarkan F-tabel, nilai kritis yang diperoleh dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu 2.27. Hasil analisis uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Secara simultan, jika dilihat nilai F-hitung yaitu 794.7828 dan probabilitasnya 0.00000. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu $\alpha 5\%$; 0.05, nilai F-tabelnya 2.27. Jika dilihat, nilai F-hitung > F-tabel dan probabilitasnya kurang dari $\alpha 5\%$; 0.05, maka semua variabel independen yaitu TPT, *dependency ratio*, Pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA) bersama-sama secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020.

Sedangkan dengan Goodness Of Fit (GOF), dengan signifikannya hasil Uji F pada $\alpha 5\%$; 0.05, maka kesimpulannya adalah penggunaan model regresi untuk memprediksi variabel Y tingkat kemiskinan dikatakan layak.

Persamaan Regresi

$$PR_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPT_{it} + \beta_2 DR_{it} + \beta_3 APM_{it} +$$

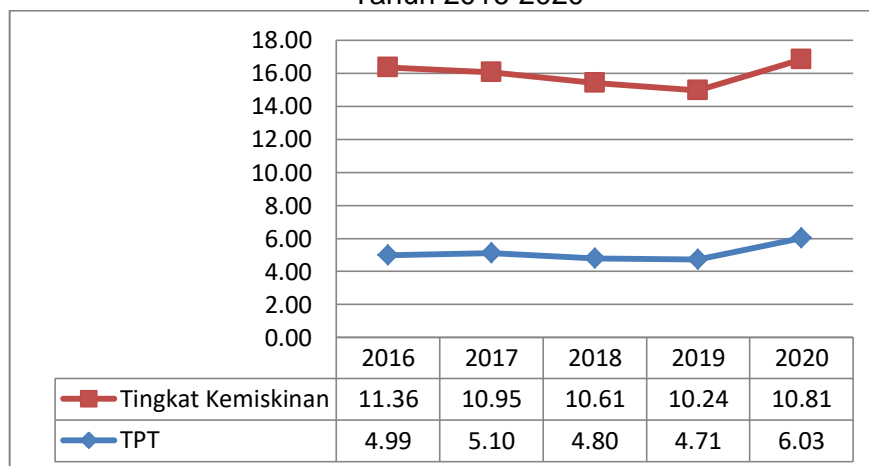
$$\beta_4 APM_{it} + \beta_5 APK_{it} + e_{it} \quad (4)$$

$$PR_{it} = 3.369032 + 5.931240 TPT_{it} + 1.320409 DR_{it} - 6.391443 APS_{it} + 2.401503 APM_{it} - 1.096064 APK_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(5)$$

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu 5.931240. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada TPT, maka tingkat kemiskinan (PR) mengalami penambahan sebanyak 5.931240% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap.

Gambar 2. Rata-Rata TPT dan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan. Dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan memiliki pergerakan yang sama. Dimana, penurunan pada tingkat pengangguran terbuka akan membuat tingkat kemiskinan juga menurun. Penurunan ini disebabkan oleh semakin bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2016-2019 keduanya terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan secara bersamaan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Berlaku juga sebaliknya, peningkatan tingkat pengangguran terbuka

mengakibatkan terjadinya peningkatan pada tingkat kemiskinan. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat oleh Putra & Arka (2018) bahwa pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali itu positif dan signifikan.

Pengaruh *Dependency Ratio* Terhadap Tingkat Kemiskinan

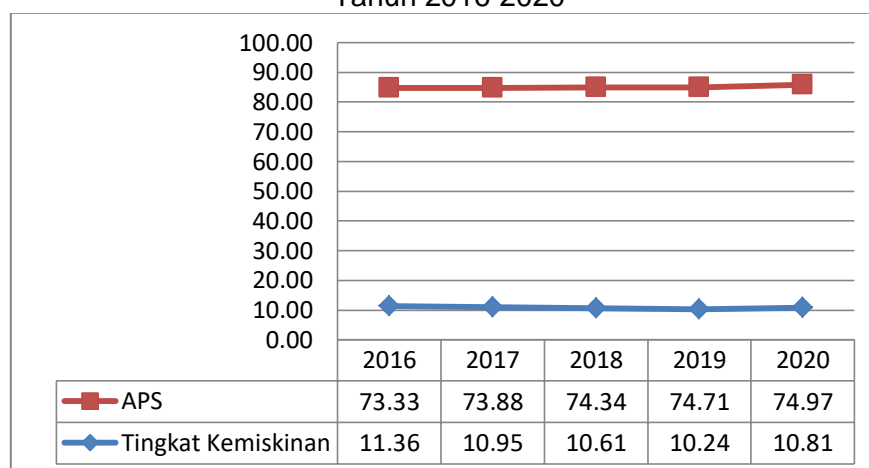
Koefisien regresi dari *dependency ratio* (DR) yaitu 1.320409. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada DR, maka tingkat kemiskinan (PR) mengalami penurunan sebanyak 1.320409% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap.

Pengaruh *dependency ratio* terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu negatif dan tidak signifikan. Tidak berpengaruhnya *Dependency ratio* terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan Indonesia didominasi oleh penduduk dengan usia kerja yang masih dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk bukan usia kerja sehingga secara keseluruhan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat oleh Lukitasari (2015) bahwa pengaruh *dependency ratio* terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat itu negatif dan tidak signifikan.

Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi dari angka partisipasi sekolah (APS) tingkat SMA yaitu - 6.391443. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada APS, maka tingkat kemiskinan (PR) mengalami peningkatan sebanyak 6.391443% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap.

Gambar 3. Rata-Rata APS dan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

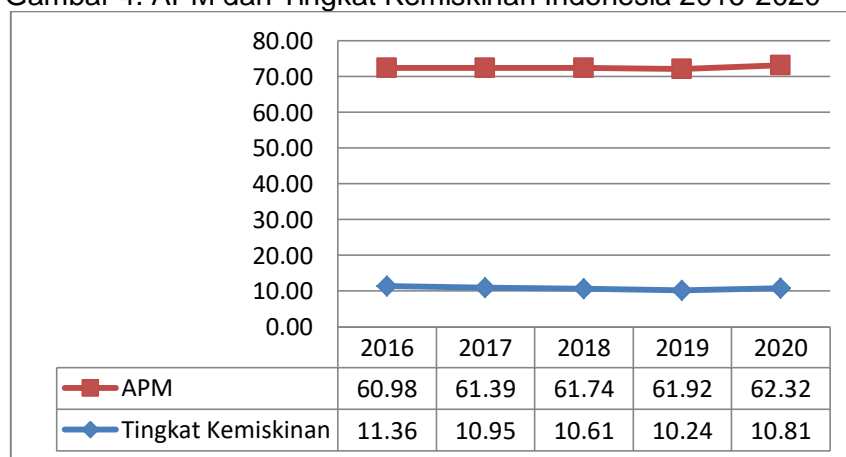
Pengaruh APS tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan. Jika dilihat dari gambar, dapat diketahui bahwa angka partisipasi sekolah dengan tingkat kemiskinan memiliki pergerakan yang cenderung sama dari tahun 2016-2020. Terutama pada tahun 2020, meningkatnya APS disertai dengan peningkatan tingkat kemiskinan, dikarenakan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada kenaikan APS yang justru meingkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan APS tidak dibarengi dengan kelebihan sumber daya manusia yang dimiliki, maka kemiskinan pun meningkat karena tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan APS, belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia. Selain itu, faktor ketidakmampuan untuk menikmati pendidikan juga masih menjadi kendala bagi Indonesia sehingga pada akhirnya kemiskinan semakin meningkat. Hasil ini didukung penelitian yang dibuat

oleh Nirwana (2013) bahwa pengaruh tingkat pendidikan (APS) terhadap persentase penduduk miskin 33 provinsi di Indonesia itu positif dan signifikan.

Pengaruh Angka Partisipasi Murni (APM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi dari variabel angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA yaitu 2.401503. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada APM, maka tingkat kemiskinan (DR) mengalami penambahan sebanyak 2.401503% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap.

Gambar 4. APM dan Tingkat Kemiskinan Indonesia 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengaruh APM tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan. Jika dilihat, APM dan tingkat kemiskinan mempunyai pergerakan yang hampir sama dari tahun 2016-2020. Kenaikan APM akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya wilayah di Indonesia dengan tingkat partisipasi pendidikan di mana terdapat usia yang lebih tua ikut dihitung dalam partisipasi jenjang pendidikan tertentu. Sehingga menimbulkan permasalahan baru karena seharusnya usia tersebut sudah dapat mencari pekerjaan. Sehingga pada akhirnya peningkatan kemiskinan pun terjadi. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Hikma et al. (2019) bahwa pengaruh APM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah itu positif dan signifikan.

Pengaruh Angka Partisipasi Kasar (APK) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi dari variabel angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA yaitu -1.096064. Maknanya adalah setiap peningkatan yang terjadi sebesar 1% pada APK, maka tingkat kemiskinan (DR) mengalami penambahan sebanyak 1.096064% per tahun, serta menggunakan asumsi yang berlaku yaitu variabel lainnya tetap.

Pengaruh APK tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu negatif dan tidak signifikan. APK melihat usia pendidikan secara kasar, maksudnya penduduk yang bukan termasuk usia suatu tingkat pendidikan pun ikut dihitung. Sehingga, APK mengindikasikan suatu keterlambatan yang menyebabkan tidak sesuainya usia dengan tingkat pendidikan yang ditempu. Masih rendahnya APK juga menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, belum meratanya program KIP di Indonesia sehingga masih banyak penduduk Indonesia yang putus sekolah yang mengakibatkan belum terlihat signifikan perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini didukung penelitian yang dibuat Amaliah (2015) bahwa pengaruh angka partisipasi kasar terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta itu tidak signifikan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini meneliti dan menganalisis faktor-faktor apa yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Hasil yang didapatkan dari uji penentuan model didapatkan bahwa model yang tepat untuk menganalisis penelitian ini yaitu FEM. Hasil dari penelitian, didapatkan:

1. Pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan, koefisiennya yaitu 5.931240. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Pengaruh *dependency ratio* terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu negatif dan tidak signifikan, koefisiennya yaitu 1.320409. Hal ini dikarenakan Indonesia didominasi oleh penduduk dengan usia kerja yang masih dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduk bukan usia kerja sehingga secara keseluruhan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Pengaruh pendidikan dengan proksi APS tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan, koefisiennya yaitu -6.391443. Hal ini dikarenakan peningkatan APS tidak dibarengi dengan kelebihan sumber daya manusia yang dimiliki, maka kemiskinan pun meningkat karena tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Selain itu, faktor ketidakmampuan untuk menikmati pendidikan juga masih menjadi kendala bagi Indonesia sehingga pada akhirnya kemiskinan semakin meningkat.
4. Pengaruh pendidikan dengan proksi APM tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu positif dan signifikan, koefisiennya yaitu 2.401503. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah di Indonesia dengan tingkat partisipasi pendidikan di mana terdapat usia yang lebih tua ikut dihitung dalam partisipasi jenjang pendidikan tertentu. Sehingga menimbulkan permasalahan baru karena seharusnya usia tersebut sudah dapat mencari pekerjaan. Sehingga pada akhirnya peningkatan kemiskinan pun terjadi.
5. Pengaruh pendidikan dengan proksi APK tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 itu negatif dan tidak signifikan, koefisiennya yaitu -1.096064. Hal ini dikarenakan belum meratanya program KIP di Indonesia sehingga masih banyak penduduk Indonesia yang putus sekolah yang mengakibatkan belum terlihat signifikan perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia.
6. Seluruh variabel independen yaitu TPT, *dependency ratio*, pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA) bersama-sama secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 yaitu merupakan variabel dependen yang digunakan peneliti.

Peneliti dapat menyampaikan saran bagi pihak yang terkait agar dapat dipertimbangkan untuk membuat suatu kebijakan, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan membuat lapangan pekerjaan baru, sehingga pengangguran terserap dan kemiskinan pun akan berkurang. Selain itu, diadakannya pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat yang akan memasuki dunia kerja agar lebih siap kerja. Lebih disosialisasikan agar semua masyarakat mendapatkan informasi tersebut.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan angka kelahiran agar *dependency ratio* tidak bertambah. Hal yang dapat dilakukan yaitu lebih gencar dalam menerapkan program keluarga berencana dan mungkin memberi sebuah *reward* apabila mematuhi peraturan yang telah dibuat.
3. Pemerintah diharapkan dapat lebih memberikan banyak bantuan dalam bidang pendidikan seperti KIP dan mensosialisasikan program tersebut agar tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, D. (2015). Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(3), 231–239. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/fjik.v2i3.595>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. ISBN: 979 814 660 3.
- Asrol, A., & Ahmad, H. (2018). Analysis of Factors that Affect Poverty in Indonesia. *Revista ESPACIOS*, 39(45).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021*. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>. [diakses tanggal 3 Maret 2021].
- BPS. (2020). *Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Das, B. (2018). Dependency Ratio and North East India: In The Wave of Demographic Transformation. *IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature*, 6(3), 61–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3167824>
- Dewi, A. I., Indrawati, L. R., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Determinan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1), 76–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i1.1397>
- Ginting, T. A. B., Sudibia, I. K., Dewi, N. P. M., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). The Effect of Education and Dependency Ratio on Economic Growth and Poverty in Papua. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(6), 186–195.
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (Terjemahan Mangunsong R.C. (ed.); 5th ed.). Jakarta: Salemba Empat. ISBN: 9789793532417.
- Hikma, A., Ramadhani, S., & Amalia, N. (2019). Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 18(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32722/eb.v18i1.3249>
- Kozak, R. S., Lombe, M., & Miller, K. (2012). Global Poverty and Hunger: An Assessment of Millennium Development Goal #1. *Journal of Poverty*, 16(4), 469–485. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10875549.2012.720661>
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. ISBN: 9789790757219.
- Lukitasari, K. (2015). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dependency Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 4(3).
- Marinda, A., Nasikh, Mukhlis, I., Witjaksono, M., Utomo, S. H., Handoko, Wahyono, H., Soesilo, Y. H., Moehariono, & Santoso, S. (2017). The Analysis of the Economic Growth, Minimum Wage, and Unemployment Rate to the Poverty level in East Java. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 127–138.
- Mishra, S. V. (2011). The Elderly Dependents in India: A Critical Review. *The Indian Journal of Spatial Science*, 2(2), 1–14.
- Nainggolan, L. E., Sembiring, L. D., & Nainggolan, N. T. (2020). Factors Affecting Poverty in North Sumatra. *International Journal of Research and Review*, 7(12), 526–533.

- Nirwana, I. D. (2013). Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa Pada Tahun 2006-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 2012.
- Nurdiana, Hasan, M., Arisah, N., Riesso, A. S., & Hasanah, D. F. (2020). An Analysis of the Effect of Economic Growth, Inflation, and Open Unemployment on Poverty in South Sulawesi Province. *Journal of Research in Business and Management*, 8(9), 14–17.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Purwanto. (2010). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN: 9786028479059.
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 8(1), 100–107. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>
- Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(3), 416–444.
- Rohana, Junaidi, & Prihanto, P. H. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Ketergantungan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 6(2), 69–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jels.v6i2.11916>
- Sukma, D. A., Indrawati, L. R., & Juliprijanto, W. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Rasio Ketergantungan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(3), 269–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v1i3.791>
- Timorria, I. F. (2021). *Jumlah Penduduk Miskin Tembus 27,55 Juta Akibat Covid-19*. Bisnis.com. Jakarta: Bisnis Indonesia. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210215/12/1356270/jumlah-penduduk-miskin-tembus-2755-juta-akibat-covid-19>. [diakses tanggal 21 November 2021].
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. ISBN: 9786021286685.
- Widowati, A. E., Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i1.1432>
- Yustie, R. (2017). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 49–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/equilibrium.v0i0.418>